

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

**I N S P E K T O R A T**

**LAPORAN HASIL EVALUASI**

**AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH  
TAHUN 2025 PADA DINKOMINFO  
KABUPATEN BANJARNEGARA**



**NOMOR : 700/49/LHE/2025**

**TANGGAL : 30 Juni 2025**

---

**INSPEKTORAT KABUPATEN BANJARNEGARA**

Jalan Dipayuda, Nomor 10 Telepon (0286) 591459, 591084

**BANJARNEGARA**



# PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

## INSPEKTORAT

Jl. Dipayuda No. 10 Telp. (0286) 591459, 591084 Fax. 591459

Sms Center 081228124447 Banjarnegara 53415

<http://inspektorat.banjarnegarakab.go.id> Email : [inspektorat@banjarnegarakab.go.id](mailto:inspektorat@banjarnegarakab.go.id)

Banjarnegara, 30 Juni 2025

Nomor : 700/49/LHE/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi  
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah  
Tahun 2025 pada Dinkominfo  
Kabupaten Banjarnegara

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Banjarnegara  
di –

### BANJARNEGARA

Bersama ini kami sampaikan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara. Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terkait, dengan hasil sebagai berikut:

## 1. PENDAHULUAN

### A. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi;
- 6) Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi SAKIP;

- 7) Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Pedoman SAKIP;
- 8) Surat Perintah Tugas Nomor 800.1.11.1/109-ST/Insp/2025 untuk Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di BPPKAD, Baperlitbang, Diskominfo, Dispermades PPKB, Kecamatan Batur, Kecamatan Punggelan, Kecamatan Madukara dan Kecamatan Banjarnegara.

#### **B. Latar Belakang Evaluasi**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Dengan evaluasi AKIP diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

#### **C. Tujuan Evaluasi**

Tujuan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara adalah:

- 1) Memperoleh informasi tentang Implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat atas implementasi SAKIP;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Implementasi SAKIP; dan
- 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

#### **D. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja, baik perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, termasuk penerapan

anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai dengan pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

#### **E. Metodologi Evaluasi**

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas AKIP adalah menggunakan metodologi kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut:

- 1) *Checklist* pengumpulan data dan informasi.
- 2) Studi dokumentasi.
- 3) Komunikasi melalui tanya jawab sederhana (*desk*).
- 4) Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Pelaksanaan penilaian dengan metodologi ini menggunakan LKE (Lembar Kerja Evaluasi) dengan komponen sebagai berikut:

No	Komponen/Sub-Komponen		Bobot
1	Perencanaan Kinerja		30,00%
	A	Pemenuhan Perencanaan kinerja	6,00%
	B	Kualitas Perencanaan kinerja	9,00%
2	Pengukuran Kinerja		30,00%
	A	Pemenuhan Pengukuran	6,00%
	B	Kualitas Pengukuran	9,00%
3	Pelaporan Kinerja		15,00%
	A	Pemenuhan Pelaporan	3,00%
	B	Penyajian Informasi Kinerja	4,50%
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		25,00%
	A	Pemenuhan Evaluasi	5,00%
	B	Kualitas Evaluasi	7,50%
	C	Pemanfaatan Evaluasi	12,50%
			100,00%

#### **F. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara**

##### **1) Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2024
1	2	3	4	6
1	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks SPBE	Nilai	3,3

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2024
1	2	3	4	6
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Tingkat responsif masyarakat terhadap informasi yang disampaikan melalui media digital	Persen	100
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	78
3	Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik	Laju pemanfaatan data sektoral	Nilai	2,1
4	Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung SPBE	Presentase OPD yang menerapkan keamanan informasi (Cascading) Jumlah sistem elektronik/aplikasi yang dilakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan informasi / siber menggunakan indeks KAMI (PK)	Aplikasi	1
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas komunikasi dan informatika	Nilai SAKIP OPD	Nilai	B (61,50)
6	Meningkatnya kualitas layanan dinas komunikasi dan informatika	Nilai survei kepuasan masyarakat	Nilai	84,2

## 2) Anggaran dan Realisasi

Anggaran dan realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi anggaran (%)
1.	Program Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	4.820.326.498,00	4.590.135.019,00	95,22
2.	Program Informasi Publik dan Komunikasi Publik	1.134.330.000,00	1.115.606.785,00	98,35
3.	Program Aplikasi Informatika	2.170.865.200,00	2.053.783.022	94,61

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi anggaran (%)
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	94.100.000,00	91.049.000,00	96,76
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Informasi Pengamanan Informasi	132.110.000,00	128.012.830,00	96,90
	Jumlah	8.351.731.689,00	7.978.586.656,00	95,53

#### G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, rekomendasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.

### 2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

#### A. Kondisi

Penilaian terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja diuraikan sebagai berikut :

##### 1) Perencanaan Kinerja (Bobot Nilai 30%)

Komponen Perencanaan Kinerja memperoleh nilai sebesar “22,20” dari target sebesar 30 atau 74,00%, dengan kondisi sebagai berikut :

- Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia memperoleh nilai A (5,40);
- Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) memperoleh nilai B (6,30);
- Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan memperoleh nilai B (10,50).

Kelemahan dalam implementasi perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

- Dokumen Perencanaan Kinerja tahun 2024 telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya, sasaran dan indikator kinerja pada Renstra dan IKU namun belum sepenuhnya menggambarkan keselarasan. Masih terdapat indikator dalam Cascading yang tidak tertuang dalam perjanjian kinerja dikarenakan tidak terdapat anggaran, sehingga Perjanjian Kinerja (PK) yang disusun tidak

menggambarkan tugas dan fungsi yang sebenarnya.

Atas kelemahan tersebut, Dinkominfo Kabupaten Banjarnegara telah melakukan perbaikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang telah membagi habis tugas dan fungsi sampai dengan level staf dan PK telah selaras dengan Sasaran Kinerja Pegawai.

- b) Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD belum semuanya SMART-C. Masih terdapat indikator kinerja yang ukurannya kurang jelas dan tidak menantang, yaitu pada indikator "Indeks KAMI". Target hanya ditentukan sebesar 100%, namun penetapan target tersebut tidak didasarkan pada kecukupan data (*data base*) mengenai jumlah aplikasi yang digunakan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, yang akan dilakukan assesment setiap tahunnya.  
Atas kelemahan tersebut, Dinkominfo Kabupaten Banjarnegara telah menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan pada definisi operasional IKU untuk Indeks KAMI yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinkominfo Kabupaten Banjarnegara Nomor 029/Tahun 2025.
- c) Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan pada website Dinas Komunikasi dan Informatika, pada alamat <https://dinkominfo.banjarnegarakab.go.id/informasi-berkala/>, namun perlu disusun penyajian informasi yang lebih interaktif, menarik, *user-friendly* dan *up to date* sehingga pengguna informasi dapat dengan mudah memanfaatkan informasi yang dibutuhkan yang tersedia dalam website.
- d) Capaian kinerja yang diperoleh dari 7 indikator telah tercapai sesuai target sebanyak 4 indikator (57,12%) dan 3 indikator (42,88%), secara keseluruhan kinerja telah melebihi target dengan capaian di atas 110%. Hal ini menunjukkan bahwa ketercapaian target belum memperhitungkan tingkat efisiensi dikarenakan penetapan target yang belum memenuhi kriteria SMART-C.
- e) Dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya dilakukan penyempurnaan yang dihasilkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dan upaya untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik. Pemantauan kinerja telah dilakukan secara berkala namun perlu dicermati kembali bahwa hasilnya adalah merupakan capaian atas rencana aksi yang telah ditetapkan sebagai langkah untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Selain itu perlu ditingkatkan kembali pemahaman, kepedulian dan komitmen pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara
- f) Sasaran dan indikator pada IKU telah sama dengan cascading. Namun pada tahun 2024 cascading belum dibagi habis kinerjanya sampai ke sub kegiatan dan/atau masih terdapat kondisi yang belum

menggambarkan keselarasan antara kondisi/ hasil yang akan dicapai pada setiap level jabatan.

Contohnya penjabaran pada dokumen PK sekretaris masih bersifat *output*, dan sama dengan yang tertuang dalam dokumen PK bawahannya.

Atas kelemahan tersebut, telah dilakukan upaya perbaikan *cascading* dan Perjanjian Kinerja untuk Tahun 2025.

- g) *Crosscutting* yang menjelaskan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, dan aktivitas antar perangkat daerah, dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan, belum disajikan secara eksplisit dan tergambar dalam pohon kinerja.

## 2) Pengukuran Kinerja (Bobot Nilai 30%)

Komponen Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar “21,60” dari target sebesar 30 atau 72,00%, dengan kondisi sebagai berikut:

- a) Pengukuran Kinerja telah dilakukan memperoleh nilai BB (4,80);
- b) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan memperoleh nilai B (6,30);
- c) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien memperoleh nilai B (10,50).

Kelemahan dalam implementasi pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

- a) Pengukuran Kinerja telah didasarkan pada SOP Pengumpulan Data Kinerja. Namun SOP Pengumpulan Data Kinerja belum memuat informasi kelengkapan data pendukung yang digunakan dalam pengukuran, agar SOP dapat dijadikan acuan pelaksanaan secara konsisten dan berkelanjutan.
- b) Keterlibatan pimpinan dalam pengambilan keputusan dalam mengukur capaian kinerja belum dapat dibuktikan secara eksplisit dalam dokumen bukti dukung rapat evaluasi kinerja. Bukti dukung berupa Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Rapat Evaluasi masih sebatas pada pemenuhan data dukung.
- c) Data kinerja dikumpulkan dalam rapat pengukuran telah dilakukan secara berkala dan komprehensif membahas realisasi anggaran dan capaian kinerja. Namun masih perlu diperkuat dengan pendokumentasian hasil yang memadai sebagai bagian dari proses penyajian data kinerja yang relevan, termasuk kemungkinan dampak ketercapaian kinerja dari hal lain yang tidak dianggarkan.
- d) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran Kinerja secara berjenjang yang dilakukan melalui penggunaan aplikasi e-kinerja dari setiap

bidang, masih memerlukan konsistensi pada implementasinya untuk menjamin bahwa capaian kinerja yang dilaporkan oleh bawahan merupakan dukungan terhadap capaian kinerja atasan serta didukung dengan sumber data yang relevan dan handal, dan sasaran kinerja pegawai telah selaras dengan PK.

- e) Belum ada kebijakan pemberian *reward* atas capaian kinerja yang berpengaruh pada tambahan pemberian tunjangan kinerja atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
- f) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi acuan untuk dilakukan perbaikan/penyesuaian terhadap strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja.
- g) Penyajian informasi efisiensi masih merupakan informasi berupa selisih belanja, belum menyajikan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan penggunaan sumber daya lainnya dalam mencapai kinerja.

### 3) Pelaporan Kinerja (Bobot Nilai 15%)

Komponen Pelaporan Kinerja memperoleh nilai sebesar **“10,95”** dari target sebesar **15** atau 73,00%, dengan kondisi sebagai berikut:

- a) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja memperoleh nilai **B (2,10)**;
- b) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya memperoleh nilai **BB (3,60)**;
- c) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya memperoleh nilai **B (5,25)**.

Kelemahan dalam implementasi pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

- a) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan telah diformalkan. Namun dokumen laporan kinerja yang disusun belum menginformasikan tahapan telah dilakukan reviu secara berjenjang terhadap penyajian informasi, yang menjelaskan mengenai ketercapaian kinerja, hambatan dan solusi yang akan ditempuh serta memastikan bahwa tidak terdapat kesalahan saji informasi.
- b) Dokumen Laporan Kinerja tidak menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*) atau level regional yang dapat memacu ketercapaian kinerja lebih baik.

Misalnya informasi mengenai target nasional SPBE yaitu sebesar

- 3,12. Hal tersebut dapat disajikan dalam uraian sebagai pembanding serta memacu peningkatan kualitas kinerja.
- c) Dokumen Laporan Kinerja telah menyajikan rincian keberhasilan dan kegagalan. Namun agar ditingkatkan pada kualitasnya, antara lain perlu disusun sistematika penyajian yang dapat menggambarkan korelasi antara pemasalahan yang dihadapi dengan solusi yang akan ditempuh.
  - d) Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan analisis efisiensi per Indikator Kinerja sasaran, baru sebatas pada penyajian efisiensi anggaran yang berasal dari sisa kontrak atau kegiatan yang tidak terlaksana. Laporan Kinerja belum menjelaskan upaya-upaya nyata yang dilakukan untuk melakukan efisiensi, mengoptimalkan penggunaan anggaran dan/atau pemanfaatan sumber daya lainnya dalam melaksanakan kegiatan.
  - e) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. Namun belum sepenuhnya dapat menggambarkan peran dan kepedulian seluruh pegawai serta upaya perubahan budaya kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara.

#### 4) Evaluasi Kinerja Internal (Bobot Nilai 25%)

Komponen Evaluasi Kinerja Internal memperoleh nilai sebesar “18,75” dari target sebesar 25 atau 75,00%, dengan kondisi sebagai berikut:

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan memperoleh nilai B (3,50);
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai memperoleh nilai B (5,25);
- c) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja memperoleh nilai BB (10,00).

Kelemahan dalam implementasi evaluasi kinerja internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

- a) Masing-masing bidang dalam unit kerja belum sepenuhnya menyampaikan evaluasi internal secara memadai sebagai dasar untuk dilakukan rekapitulasi capaian kinerja unit kerja sebagai bahan evaluasi di tingkat unit kerja, dan belum dilakukan secara berjenjang. Atas kelemahan tersebut, Dinkominfo Kabupaten Banjarnegara telah melakukan perbaikan pada Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 untuk Triwulan 1.
- b) Kebijakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal baru menggunakan Perbup. Masih perlu didukung dengan pedoman teknis (SOP) yang

- sesuai dengan kondisi unit kerja sehingga dapat menjadi acuan bagi Tim Evaluasi untuk memastikan seluruh personil yang ditunjuk memiliki tanggung jawab dan melaksanakan evaluasi sesuai dengan standar.
- c) Secara umum, telah terdapat peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja sesuai dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal periode sebelumnya, namun masih diperlukan konsistensi dalam pelaksanaan tahapan implementasi SAKIP untuk memastikan adanya efektivitas dan efisiensi serta pemanfaatan hasil evaluasi

## B. Rekomendasi

Terhadap kelemahan yang telah dikemukakan diatas, untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi Implementasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara, maka Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara dapat melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
  - a. Menyusun Pohon Kinerja dan *Cascading Kinerja* Tahun 2025 – 2029 yang menggambarkan kerangka logis yang menjelaskan hubungan sebab-akibat antara sasaran dan indikator kinerja yang SMART. Selanjutnya diterjemahkan kedalam proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis dan pembagian kinerja sesuai tugas dan fungsi ke seluruh individu serta diperkuat dengan membangun komitmen dan kepedulian individu atas perencanaan kinerja yang menjadi tanggung jawabnya.
  - b. Meningkatkan kualitas pemantauan yang telah dilakukan secara berkala atas capaian kinerja dengan memastikan rencana aksi yang telah disusun dapat dilaksanakan dan didukung dengan penyajian data yang telah divalidasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sehingga dapat mendorong adanya perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan berdasarkan hasil analisis atas kinerja sebelumnya sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik.
  - c. Penyajian informasi pada *website* agar yang lebih interaktif, menarik, *user-friendly* dan *up to date* sehingga pengguna informasi dapat dengan mudah memanfaatkan informasi yang dibutuhkan yang tersedia dalam *website*.
2. Pengukuran Kinerja
  - a. Memastikan pedoman teknis dan/atau SOP pengumpulan data dan pengukuran kinerja telah diterjemahkan dalam langkah-langkah yang dapat dilaksanakan secara efektif dan dipahami oleh seluruh pegawai, dengan cara menambahkan informasi tentang sumber data yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan uraian proses reviu

- berjenjang atas pengukuran kinerja.
- b. Memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga menghasilkan informasi kinerja yang akurat berdasarkan data yang telah dievaluasi secara berjenjang.
3. Pelaporan Kinerja
- a. Menyajikan informasi yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya pada laporan kinerja yang telah dipastikan keakuratannya dengan reviu secara berjenjang.
  - b. Meningkatkan kualitas penyusunan pelaporan kinerja (LKjIP) Tahun 2025, antara lain pada:
    - Penyajian informasi mengenai capaian kinerja yang setara/sejenis dari Instansi lainnya (*benchmark*) untuk mendorong berbagai upaya perbaikan dan inovasi dalam pencapaian kinerja yang lebih baik.
    - Penyajian keberhasilan dan kegagalan agar lebih secara spesifik tidak hanya bersifat umum, karena merupakan penggambaran dari kinerja yang sudah dilaksanakan, sehingga pengguna laporan mendapatkan gambaran keterkaitan antara isu strategis dan pemasalahan yang dihadapi dengan solusi yang ditempuh.
    - Penyajian informasi efisiensi ditambah dengan penyajian upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan penggunaan sumber daya lainnya dalam mencapai kinerja, tidak hanya menyajikan selisih belanja.
    - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, agar disertai analisis yang menyajikan program/kegiatan sebagai pendukung utama dan yang menjadi penunjang keberhasilan.
    - Pada bab penutup penyajian simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya, agar strategi yang akan dilakukan disebutkan dengan jelas.
  - c. Mendorong seluruh pegawai untuk memiliki kepedulian terhadap pencapaian kinerja yang telah dihasilkan sehingga mampu mempengaruhi budaya kinerja pada unit kerja sehingga menghasilkan perbaikan di masa yang akan datang.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Memastikan evaluasi internal didukung dengan kebijakan dan langkah kerja yang terukur serta didukung dengan sumber daya yang telah

- memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi sehingga menghasilkan telaah yang berkualitas.
- b. Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi serta perbaikan dan peningkatan kinerja yang didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi.

### 3. PENILAIAN KINERJA ORGANISASI

Penilaian Kinerja Organisasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Hasil Penilaian Kinerja (PKO) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
							(1)	
(1)	(2)	(3) (1) x (100% - (2))						
1	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks SPBE	330%	372%	112.73%	110%	10%	99.00%
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Tingkat responsif masyarakat terhadap informasi yang di sampaikan melalui media digital	100%	100%	100%	100%	10%	90.00%
3	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	78	89.56	114.82%	110%	10%	99.00%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik	Laju pemanfaatan data sektoral	2.1	2.98	141.90%	110%	10%	99.00%
	Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung SPBE	Presentase OPD yang menearapkan keamanan informasi (Cascading) Jumlah sistem elektronik/ aplikasi yang dilakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan informasi / siber menggunakan indeks KAMI (PK)	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	100%	10%	90.00%
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas komunikasi dan informatika	Nilai SAKIP OPD	B/61,50	72.1	103.87%	103.87%	10%	93.48%
6	Meningkatnya kualitas layanan dinas komunikasi dan informatika	Nilai survei kpuusan masyarakat	84.2	84.5	100%	100%	10%	90.00%
Total Capaian PK (4)							660%	
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)							94.35%	
Predikat PKO (6)							BAIK	

## 4. PENUTUP

### A. Simpulan

- 1) Berdasarkan evaluasi internal Inspektorat Kabupaten Banjarnegara, nilai akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 sebesar **73,50** dengan kategori **BB “Sangat Baik”** dengan pernyataan: “Akuntabilitas sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator”. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja yang terdiri dari:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian
A	Perencanaan Kinerja	30%	22,20
B	Pengukuran Kinerja	30%	21,60
C	Pelaporan Kinerja	15%	10,95
D	Evaluasi Internal	25%	18,75
<b>Penilaian</b>		<b>100%</b>	<b>73,50</b>

- 2) Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) merupakan gambaran capaian program/kegiatan/ aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. PKO Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **94,35%** dengan Predikat PKO **”BAIK”** interpretasi “Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi”.

### B. Dorongan terhadap implementasi SAKIP lebih baik

Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka unit kerja/instansi pemerintah harus berkomitmen dan secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan target capaian kinerja yang telah direncanakan.

### C. Apresiasi

Inspektorat Kabupaten Banjarnegara menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kerja sama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara sehingga Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2025 pada Diskominfo Kabupaten Banjarnegara, dapat dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Demikian hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara disampaikan, untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.



**Tembusan:** disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Banjarnegara (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara (sebagai laporan).